

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi beban ganda masalah kesehatan, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular seperti tuberkulosis dan demam berdarah masih menjadi perhatian, sementara penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung terus meningkat akibat perubahan pola hidup masyarakat. Selain itu, masalah kesehatan ibu dan anak juga menjadi fokus utama, terutama terkait dengan tingginya angka *stunting* yang mencerminkan kondisi gizi kronis pada anak.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mengupayakan berbagai program promotif dan preventif, seperti kampanye hidup sehat, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan primer melalui puskesmas dan posyandu. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk daerah

terpencil. Faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur turut memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem kesehatan yang sesuai dengan harapan kedepannya.

Kejadian balita pendek atau memiliki ukuran tinggi yang tidak biasa disebut dengan istilah *stunting*. *Stunting* adalah kondisi dimana gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kurangnya gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya.¹ Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi berada didalam kandungan ibu. Pada saat bayi lahir, kondisi *stunting* biasanya akan terlihat setelah anaknya menginjak usia dua tahun.

Stunting dalam jangka pendek mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, serta dalam jangka panjang *stunting* dapat mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, *stroke*, serta disabilitas pada usia tua.² Masalah *stunting* ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak dan bangsa nantinya. Hal ini disebabkan karena *stunting* mempengaruhi kecerdasan anak dalam proses belajar, dengan begitu anak yang terdampak *stunting* akan lebih lambat dalam menangkap atau menyerap pelajaran yang di dapatkan. Dampak dari *stunting* ini juga mempengaruhi kualitas SDM untuk generasi bangsa kedepannya.

Permasalahan *stunting* telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan pasal 4 dalam peraturan tersebut bahwa

¹ Komalasari, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Kejadian *Stunting* Pada Balita", Jurnal Majalah Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2020), Hal. 52.

² *Ibid.*

percepatan penurunan *stunting* ini menjadi strategi nasional untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dan percepatan target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.³ *Stunting* menjadi salah satu permasalahan yang harus di perhatikan lebih oleh Pemerintah maupun semua kalangan, karena *stunting* ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan kekurangan gizi dari dalam kandungan sampai pada saat lahir serta berdampak kepada panjang dan tinggi badan anak.

Indonesia merupakan negara yang masih memiliki angka *stunting* tertinggi di masing-masing provinsi yang ada di daerah tersebut. Faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki angka *stunting* tertinggi ialah dikarenakan masalah kemiskinan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah, sehingga kemiskinan yang masih tinggi ini menjadikan salah satu faktor utama Negara Indonesia mencapai angka *stunting* yang tinggi. Berikut disajikan data mengenai jumlah sebaran *stunting* di Indonesia tahun 2019-2024.

TABEL 1. 1 Data Jumlah Sebaran *Stunting* di Indonesia Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Balita (Anak)	<i>Stunting</i>		Persentase Kasus <i>Stunting</i> (%)
			Pendek (Anak)	Sangat Pendek (Anak)	
1.	2019	5.384.219	464.566	186.881	12.1
2.	2020	7.318.808	556.077	241.471	10.9
3.	2021	14.129.211	982.052	359.484	9.5
4.	2022	15.796.781	977.108	344.129	8.4

³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

5.	2023	16.451.587	884.003	288.048	7.1
6.	2024	15.910.826	728.558	238.518	6.1

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya jumlah balita yang mengalami *stunting* terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa *stunting* di Indonesia membutuhkan tanggapan dan pertolongan yang serius untuk dapat menghentikan pertumbuhan *stunting* yang terus meningkat. Setiap provinsi di Indonesia terdaftar sebagai daerah yang memiliki masalah *stunting* tanpa terkecuali.

Pada tahun 2024, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan pendataan mengenai jumlah *stunting* di provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu sebagai berikut.

TABEL 1. 2 Jumlah *Stunting* Pada Provinsi Yang Ada di Pulau Sumatera Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Balita (Anak)	<i>Stunting</i>		Persentase Kasus <i>Stunting</i> (%)
			Pendek (Anak)	Sangat Pendek (Anak)	
1.	Aceh	394.129	18.641	5.962	6.2
2.	Sumatera Utara	946.365	19.631	8.458	3.0
3.	Sumatera Barat	377.410	23.481	7.143	8.1
4.	Riau	368.260	6.877	2.301	2.5
5.	Jambi	209.492	4.058	1.651	2.7
6.	Sumatera Selatan	588.116	5.842	2.353	1.4
7.	Bengkulu	107.916	3.386	820	3.9

8.	Lampung	533.985	11.126	3.560	2.8
9.	Kepulauan Bangka Belitung	97.246	2.363	801	3.3
10.	Kepulauan Riau	118.312	2.874	868	3.2

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang memiliki persentase kasus *stunting* tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera yaitu sebesar 8.1 persen. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat memiliki prevalensi balita *stunting* sebesar 25,2 persen dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada 23,3 persen.⁴ Terdapat enam Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Barat memiliki prevalensi balita *stunting* di atas rata-rata provinsi, yaitu sebagai berikut.

TABEL 1. 3 Persentase Balita *Stunting* di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah	E-PPGBM 2023 (%)
1	Kabupaten Solok	17,3
2	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17
3	Kabupaten Sijunjung	15,7
4	Kabupaten Pasaman	15,4
5	Kota Padang Panjang	13,9
6	Kabupaten Pasaman Barat	13,6

⁴ Website databoks, Ini Wilayah dengan Prevelensi *Stunting* Tertinggi di Sumatra Barat pada tahun 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/ini-wilayah-dengan-prevalensi-stunting-tertinggi-di-sumatra-barat-pada-2022>, diakses pada 23 juli 2024.

7	Kabupaten Tanah Datar	13,3
8	Kota Bukittinggi	12,8
9	Kota Pariaman	10,6
10	Kabupeten Solok Selatan	10,4
11	Kabupaten Padang Pariaman	9,5
12	Kabupaten Limapuluh Kota	8,8
13	Kota Solok	8,3
14	Kabupaten Pesisir Selatan	7,1
15	Kabupaten Agam	7,1
16	Kabupaten Dhamasraya	6,9
17	Kabupaten Sawah Lunto	4,7
18	Kota Padang	3,7
19	Kota Payakumbuh	2,7

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan anak yang beresiko terkena *stunting* bersama Badan Kependudukan keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan melakukan pemetaan anak yang beresiko *stunting* ini melalui posyandu maupun klinik kesehatan dan puskesmas, pemerintah daerah akan mengetahui anak yang beresiko terkena *stunting*. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumatera Barat mengalami kenaikan angka prevalensi *stunting* sekitar 1,9% dari angka 23,03% yang terjadi pada tahun 2021 menjadi 25,02% di tahun 2022. Kenaikan yang terjadi ini menunjukkan bahwasannya *stunting* yang terjadi saat ini di Provinsi Sumatera Barat belum mengalami penurunan yang signifikan

hingga tahun 2022. Mengenai perkembangan *stunting* di tahun 2023, berikut dijabarkan daerah yang mengalami kenaikan *stunting* tertinggi di Sumatera Barat.

TABEL 1. 4 Tiga Daerah di Sumatera Barat Mengalami Kenaikan *Stunting* Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (%)
1	Kabupaten Pasaman	11
2	Kabupaten Agam	5
3	Kota Padang	0,4

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat terdapat tiga daerah yang mengalami kenaikan angka *stunting* cukup tinggi yaitu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Tiga Kabupaten/kota tersebut mengalami kenaikan *stunting* yang cukup tinggi pada tahun 2023. Prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 berada pada angka 30,2% dan di tahun 2022 menjadi 28,9%. Angka *stunting* Kabupaten Pasaman masih jauh dari pada target nasional di tahun 2024 yaitu 14%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dan berdasarkan Instruksi Persiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditargetkan 0% pada tahun 2024.

Kabupaten Pasaman sebelumnya berada diurutan keenam dengan tingkat *stunting* tertinggi di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Pasaman mengalami kenaikan angka *stunting* yang cukup tinggi selama satu tahun dan berada diurutan paling atas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan kenaikan terbesar di tahun 2022.

Kejadian *stunting* di Kabupaten Pasaman cukup banyak terjadi dan mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman berusaha untuk melakukan evaluasi dengan

mencari solusi dari penanggulan *stunting* di daerah tersebut. Berikut disajikan data dalam persentase mengenai prevelensi *stunting* per-kecamatan di Kabupaten Pasaman dari tahun 2021-2024.

TABEL 1. 5 Persentase Data *Stunting* Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (1 Juni) (%)
1.	Bonjol	19.13	17.65	21.82	22.48
2.	Tigo Nagari	22.32	25.17	19.81	17.89
3.	Simpat	23.12	23.19	26.19	28.14
4.	Lubuk Sikaping	10.95	6.60	7.97	14.13
5.	Duo Koto	11.99	19.11	22.60	16.29
6.	Panti	23.39	22.55	18.98	22.32
7.	Padang Gelugur	23.58	22.55	11.69	16.55
8.	Rao	11.84	7.45	6.73	6.62
9.	Mapattunggul	10.89	10.99	12.36	10.10
10.	Mapattunggul Selatan	29.14	25.61	27.37	22.51
11.	Rao Selatan	11.15	7.40	8.34	10.57
12.	Rao Utara	21.37	16.71	14.56	12.16
	Pasaman	17.63	16.03	15.52	16.40

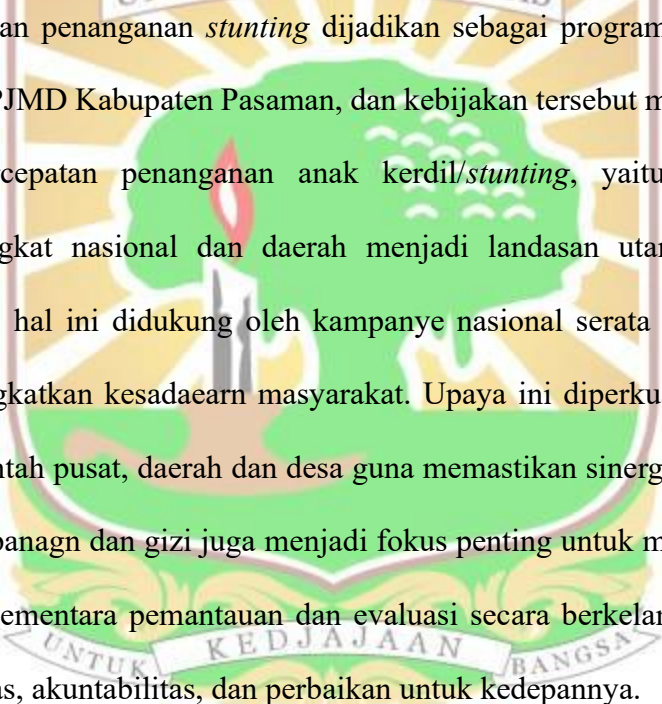
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada visi dan misi Kabupaten Pasaman dalam RPJMD daerah tersebut, salah satu misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan pencapaian visinya itu ialah terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Dalam visi dan misi tersebut dijelaskan lebih jauh mengenai strategi dan arah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Pasaman dalam mendorong dan mendukung pencegahan *stunting* melalui bina keluarga. Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan pembangunan keluarga melalui penguatan kelembagaan dan KKBPK, serta meningkatkan kesetaraan gender perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

Dalam mencapai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman merincikan arah kebijakan yang dapat dilakukan agar strategi yang dibuat dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Adapun arah kebijakannya, yaitu peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; peningkatan kebijakan dan layanan dalam pengendalian penduduk dan KB; peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja dalam pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja; peningkatan penyuluhan dan pengembangan fungsi dan peran kegiatan kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia; dan beragam arah kebijakan lainnya yang mendorong serta mendukung perlindungan terhadap anak dan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan *stunting*, salah satunya dengan melakukan rembuk *stunting* yang melibatkan seluruh komponen terkait. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman dan mengikut sertakan Pengurus TP PPK Pasaman, Kepala Kementrian Agama Pasaman, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala BPS Pasaman, Ketua Baznas, TAPM PIC *Stunting* Pasaman, TA Satgas *Stunting* Pasaman, Kepala Puskemas, Korlap Balai Penyuluhan KB, Camat dan Wali Nagari se Pasaman. Dengan demikian

Pemerintah Kabupaten Pasaman mengharapkan kepada seluruh komponen terkait maupun Masyarakat agar dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya rapat koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* ini dapat menjadi ajang perbaikan supaya penanganan *stunting* lebih maksimal daripada tahun sebelumnya sehingga pemerintah dapat melihat sejauh mana langkah yang telah terlaksana dengan baik, penanganan *stunting* tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat akan tetapi perlu waktu yang sangat panjang dan tahap demi tahap salah satunya dengan merubah pola pikir masyarakat yang masih terbelakang.



Selain itu kebijakan penanganan *stunting* dijadikan sebagai program prioritas daerah yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Pasaman, dan kebijakan tersebut memiliki lima pilar pada strategi nasional percepatan penanganan anak kerdil/*stunting*, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah menjadi landasan utama dalam mendorong keberhasilan program, hal ini didukung oleh kampanye nasional serata komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadacearn masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui konvergensi program antar pemerintah pusat, daerah dan desa guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan di lapangan. Ketahanan panagn dan gizi juga menjadi fokus penting untuk mendukung peningkatan kualitas masyarakat, sementara pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan guna memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan perbaikan untuk kedepannya.

Tingginya angka *stunting* yang terjadi di Kabupaten Pasaman menyebabkan pemerintah cepat tanggap dalam membuat kebijakan untuk mendukung kegiatan atau program mengenai penanganan *stunting* di daerah tersebut. Kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman. Selain ditetapkannya peraturan tersebut, adapun langkah awal yang dapat dilakukan untuk membantu penanganan *stunting* ialah dengan melakukan peningkatan status gizi pada anak.

Pemerintah juga mendukung upaya penanganan *stunting* dengan memberikan informasi terkait pola asuh dan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan sebelum mereka berkeluarga. Untuk upaya peningkatan gizi anak yang dilakukan pemerintah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang upaya perbaikan gizi.

Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, serta melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Pasaman sebagai pimpinan.⁵ Adapun program yang dibuat yaitu tentang pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan status anemia, pemeriksaan kesehatan kepada calon pasangan usia subur, memantau anak usia dibawah lima tahun, dan beragam program lainnya yang berkaitan dengan upaya penanganan *stunting*. Terkait pemantauan serta pelaksanaan program tersebut Dinas Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasaman. Berikut dilampirkan data mengenai *stunting* yang terjadi di Kabupaten Pasaman tahun 2022

Dampak *stunting* juga memicu masalah Kesehatan yang signifikan, ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata akibat asupan nutrisi yang tidak sesuai dengan semestinya. Penyebab *stunting* bermacam-macam, meliputi kekurangan gizi, infeksi berulang, dan kesehatan ibu serta gizi yang tidak sesuai selama kehamilan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kegagalan mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun seorang anak. Dapat juga dilihat dari kebiasaan anak yang kurang suka mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seperti makan ikan. Ironisnya *stunting* dapat menyebabkan pertumbuhan postur tubuh yang tidak optimal ketika

⁵ Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

menginjak usia dewasa. Selain itu anak yang dikategorikan *stunting* rentan terserang penyakit seperti obesitas, Kesehatan reproduksi, kapasitas belajar bahkan yang lebih buruk resiko kematian yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa serta menjabarkan mengenai peran dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman khususnya Dinas Kesehatan dalam pencegahan *stunting* yang sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. *Stunting* menjadi salah satu prioritas Pemerintah Daerah hal ini dikarenakan Kabupaten Pasaman sebelumnya berada di urutan keenam dengan tingkat *stunting* tertinggi di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Pasaman mengalami kenaikan angka *stunting* yang cukup tinggi selama satu tahun dan berada di urutan paling atas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan kenaikan terbesar di tahun 2022. Penelitian ini juga menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto. Teori ini digunakan peneliti karena sinkron dengan kondisi penelitian dari peneliti, yang mana disini peneliti meneliti terkait peran pemerintah khususnya peran dari Dinas Kesehatan dalam pencegahan *stunting* atau terjadinya kasus *stunting* pada anak di daerah tersebut.

Adapun bentuk peran pemerintah daerah yang dibahas dalam teori ini, Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi *stunting* dibawah 14% pada tahun 2022. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa di beberapa wilayah angka *stunting* masih di atas 20%. Meskipun berbagai program intervensi telah dijalankan, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama akibat kurangnya alokasi dana yang tepat dan koordinasi lintas sektor. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlunya peran pemerintah yang lebih terarah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau instansi dan organisasi terkait secara aktif untuk pelaksanaan program pencegahan *stunting*.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan lokasi penelitian yang mana penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasaman serta penelitian ini juga membahas secara keseluruhan mengenai peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan *stunting* di daerah tersebut pada tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang berjudul “Peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman” ialah ***Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman?***

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman ini ialah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman kegiatan ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman.

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam melakukan upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait untuk dapat merasakan dampak dari adanya peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman.

